

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Yulihastin, 2008). Dalam menjalankan fungsinya, Polri tidak hanya bertindak sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan publik yang dituntut untuk bersikap humanis, responsif, dan profesional dalam menghadapi berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

Struktur organisasi Polres mengacu pada Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Di tingkat Polres, terdapat satuan fungsi yang melaksanakan tugas operasional maupun pembinaan yaitu Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), Satuan Reserse Narkoba (Sat Narkoba), Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam), Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas), Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Samapta), Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas), Satuan Profesi dan Pengamanan (Propam), dan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (Perkap No. 23 Tahun 2010, Pasal 23-35).

Salah satu satuan pelaksana tugas-tugas tersebut adalah Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Samapta), yaitu unsur pelaksana tugas operasional yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor, serta bertugas membantu pimpinan

dan staf dalam pelaksanaan fungsi kepolisian di tingkat wilayah (Herlambang, 2015). Tugas pokok Sat Samapta adalah melaksanakan fungsi preventif kepolisian, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau gangguan ketertiban umum, melalui kegiatan penjagaan, pengawalan, dan patroli secara berkala berdasarkan Perkab Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 55. Dalam praktiknya, personel Sat Samapta kerap ditempatkan di garis depan dalam menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan kericuhan atau gangguan keamanan, seperti pengendalian massa, penanganan unjuk rasa, hingga evakuasi dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, anggota Sat Samapta dituntut untuk memiliki kesiapsiagaan tinggi, kemampuan pengendalian emosi, serta ketahanan fisik dan psikologis yang kuat guna mendukung pelaksanaan tugas yang bersifat dinamis dan penuh tekanan.

Tugas yang bersifat dinamis dan seringkali mendadak menuntut kesiapsiagaan fisik dan mental yang optimal dari anggota, apalagi dalam menghadapi berbagai kondisi sosial yang kompleks seperti pengendalian massa, evakuasi darurat, hingga patroli rutin di berbagai lokasi (Widiasari, Supriyati, & Harkina, 2023). Kompleksitas dan tuntutan tugas anggota Polisi di lapangan tersebut seringkali menjadi faktor pemicu yang menyebabkan anggota polisi mudah stres dan frustrasi, Situasi ini tidak hanya mengganggu kondisi psikologis, tetapi juga menimbulkan risiko yang dapat mengancam keselamatan mereka saat bertugas. (Widiasari, Supriyati & Harkina, 2023).

Sejalan dengan itu, Fatimah (2023) menemukan bahwa bidang kerja turut berkontribusi pada kesejahteraan psikologis anggota polisi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik kerja, termasuk kompleksitas tugas dan mobilitas tinggi, merupakan faktor penting yang memengaruhi psychological well-being aparat kepolisian. Selain itu, mobilitas tinggi yang melekat pada Sat Samapta membuat personel harus siap ditempatkan di berbagai lokasi dengan kondisi yang berbeda-beda, sehingga semakin menambah dinamika dan tantangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 14 sampai 18 april 2025 di wilayah kerja Polres Sukoharjo, intensitas penugasan personel Sat Samapta tergolong tinggi. Hal ini tidak terlepas dari tingginya peran sosial kemasyarakatan yang membutuhkan kehadiran personel secara berkala, baik dalam kegiatan evakuasi, patroli rutin dan pengendalian massa. Dalam pelaksanaan tugas pengendalian massa, terdapat berbagai resiko yang dihadapi oleh personel di lapangan. Situasi di lapangan yang dinamis dan berpotensi konflik menimbulkan ancaman keselamatan fisik, seperti luka pada bagian mata dan hidung akibat lemparan benda, hingga cedera berat seperti patah tulang kaki yang dialami oleh beberapa personel saat melaksanakan tugas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa personel Sat Samapta Polres Sukoharjo, bahwa pekerjaan mereka tidak hanya menuntut kesiapan fisik, tetapi juga ketangguhan mental dan emosional. Para personel mengungkapkan bahwa dalam menjalankan tugas sehari-hari, mereka sering dihadapkan pada situasi yang penuh tekanan, mulai dari menghadapi massa dalam kondisi yang tidak kondusif, menangani konflik di masyarakat, menjalani

patroli malam hingga ekspektasi masyarakat terhadap kinerja kepolisian membuat personel berada dalam kondisi yang rawan terhadap kelelahan mental. Meskipun demikian, mereka tetap berupaya untuk menjaga stabilitas emosional dan tampil prima dalam menjalankan tugasnya. Namun di balik itu, sebagian besar dari mereka menyatakan tetap merasa bangga dan memiliki makna atas peran yang dijalani sebagai pelindung masyarakat. Para personel menyampaikan bahwa tantangan-tantangan tersebut tidak jarang memengaruhi kondisi psikologis mereka, terutama ketika harus menekan perasaan lelah, emosi, bahkan ketakutan yang muncul secara alami saat menghadapi situasi berisiko tinggi. Meski demikian, mereka berusaha untuk tetap tampil tenang dan profesional, karena menyadari bahwa masyarakat menggantungkan rasa aman kepada kehadiran mereka. Beberapa di antaranya mengakui bahwa dukungan dari rekan kerja, keluarga, dan atasan menjadi faktor penting yang membantu mereka bertahan secara mental. Selain itu, sebagian personel juga menyebutkan bahwa rasa tanggung jawab terhadap tugas, serta keyakinan bahwa pekerjaan mereka bermanfaat bagi orang banyak, menjadi motivasi utama yang menjaga semangat mereka tetap hidup. Tingginya frekuensi perpindahan lokasi tugas, baik secara mendadak maupun terjadwal, dapat memunculkan kelelahan fisik, berkurangnya waktu istirahat, serta terbatasnya kesempatan untuk berinteraksi dengan keluarga maupun lingkungan sosial. Kondisi ini pada akhirnya dapat memengaruhi keseimbangan hidup personel, yang merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga *psychological well-being*.

Psychological well-being menurut Ryff (1989) meliputi beberapa dimensi, antara lain penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi,

penguasaan lingkungan, tujuan hidup, serta pertumbuhan pribadi. Kompleksitas tugas dan mobilitas tinggi dapat mengganggu dimensi-dimensi tersebut. Misalnya, jadwal kerja yang padat berpotensi menurunkan kualitas hubungan sosial dengan keluarga maupun rekan di luar pekerjaan, situasi tugas yang penuh tekanan dapat memengaruhi penerimaan diri dan kemampuan untuk melihat pengalaman secara positif, serta mobilitas tinggi dapat menghambat penguasaan lingkungan karena individu harus terus beradaptasi dengan tempat dan kondisi yang berbeda. Jika tidak dikelola dengan baik, tekanan yang muncul dari kompleksitas tugas dan mobilitas tinggi ini dapat berimplikasi pada menurunnya *psychological well-being* personel (Sari, Putri & Lutfianawati, 2023). Sebaliknya, jika personel mampu mengembangkan strategi coping, dukungan sosial, serta memiliki tujuan hidup yang jelas dalam pengabdian sebagai anggota Polri, maka kompleksitas tugas dan mobilitas justru dapat menjadi sarana bagi pertumbuhan pribadi dan penguatan makna hidup (Sairah & Utami, 2022). Fenomena tingginya intensitas penugasan dan mobilitas yang dialami personel Sat Samapta di Polres Sukoharjo ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa beban kerja yang berlebihan dan perpindahan lokasi tugas yang sering dapat menyebabkan gangguan fisik dan psikologis, termasuk stres kerja, kelelahan kronis, serta penurunan motivasi kerja (Putra & Rahman, 2022). Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada produktivitas dan kualitas pelayanan kepolisian, tetapi juga dapat menimbulkan risiko kesehatan mental yang serius jika tidak mendapatkan perhatian dan penanganan yang memadai (Wijaya, Sari & Pranoto, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai “*Psychological well-being* pada personel Sat Samapta di Polres Sukoharjo” serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi kondisi tersebut.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *Psychological Well-Being* Personel SAT SAMAPTA di Polres Sukoharjo.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan gambaran yang positif bagi pembaca mengenai *psychological well-being* personel sat samapta di Polres Sukoharjo.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman pada penulis.

b. Bagi Polres Sukoharjo

Penelitian ini diharapkan menjadi manfaat dan tambahan informasi mengenai *Psychological Well-Being* pada Personel Sat Samapta di Polres Sukoharjo.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan guna menambah wawasan dan pengalaman kepada masyarakat umum tentang *Psychological Well-Being* pada Personel Sat Samapta Polres Sukoharjo.

- d. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Psychological Well-Being* pada Personel Sat Samapta di Polres Sukoharjo.

1.4 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
Novi Devita Mayang Sari, Asri Mutiara Putri, Dewi Lutfianawati 2024	Pengaruh Stres Kerja Dan Usia Terhadap <i>Psychological Well-Being</i> Pada Anggota Polisi di Polda Lampung	Kuantitatif	Berdasarkan hasil uji statistik, menunjukkan bahwa ada pengaruh stres kerja dan usia terhadap <i>psychological well-being</i> pada anggota kepolisian daerah (POLDA) Lampung,

			<i>psychological well-being</i> dapat dijelaskan oleh stres kerja dan usia.
Alfret	Hubungan Antara	Kuantitatif	Hasil penelitian
Abraham	Stres Kerja Dengan		menunjukkan
Sopacuaperu,	<i>Psychological Well-</i>		hubungan positif
Sri Aryanti	<i>Being</i> Pada Anggota		yang signifikan
Kristianingsih	Polri Polda Maluku		antara <i>psychological well being</i> dan stres kerja pada anggota Polri Polda Maluku ($r= 0,369, p= 0,000$).
2024			Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi stres kerja maka semakin tinggi <i>psychological well being</i> begitupun

sebaliknya semakin rendah stres kerja maka semakin rendah *psychological well being*. Implikasi dari penelitian ini adalah anggota Polri Polda Maluku diharapkan dapat meningkatkan penerimaan diri, membangun hubungan positif dengan orang lain, penguasaan lingkungan, otonomi, pengembangan diri melalui bakat dan kemampuan serta memiliki tujuan hidup. Selain itu, instansi

Polda Maluku dapat melakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan berpikir kritis dan konseling.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis sampaikan sebelumnya, mengenai penelitian *Psychological Well-Being* Pada Personel Sat Samapta di Polres Sukoharjo belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga penulis mengatakan bahwa penelitian ini masih asli.

Pembeda penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi serta lokasi penelitian dan subjek penelitian yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Psychological Well-Being

A. Pengertian *Psychological Well-Being*

Ryff (1989) menjelaskan bahwa *psychological well-being* sebagai pencapaian penuh dari potensi psikologis seseorang. Dimana individu tersebut dapat menerima kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, menciptakan hubungan positif dengan orang lain yang ada disekitarnya, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan mandiri, mampu dan berkompetensi untuk mengatur lingkungan, memiliki tujuan hidup, dan merasa mampu untuk melalui tahapan perkembangan dalam kehidupannya. Ryff memandang *psychological well-being* merupakan penggambaran kesehatan psikologis seseorang. Kesejahteraan psikologis merupakan suatu kondisi dimana individu dapat memenuhi fungsi psikologi positif dengan baik.

Huppert (2009) mengatakan bahwa *psychological well-being* adalah mengenai hidup yang berjalan dengan baik, yang merupakan gabungan dari perasaan baik dan bagaimana individu berfungsi secara efektif.

Diener (2009) juga mendefinisikan bahwa kesejahteraan psikologis adalah kondisi yang sangat penting bagi individu, seseorang yang memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang tinggi akan berdampak positif pada kesehatan fisik seseorang, meningkatkan kualitas hidup, dan memperpanjang usia.

Dari beberapa pengertian *psychological well-being* yang dikemukakan oleh

beberapa tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan psikologis yaitu sebuah pencapaian dari potensi psikologis dan pemenuhan fungsi psikologi positif dimana individu mampu menerima diri dengan apa adanya, dapat mengembangkan relasi yang positif dengan orang lain, memiliki kemandirian, memiliki tujuan hidup, mampu mengendalikan lingkungan sekitar dan terus tumbuh secara personal. simpulan *psychological well-being* dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Ryff (1989) yang berarti mengarah pada kondisi individu yang mampu menghadapi berbagai hal yang dapat memicu permasalahan dalam kehidupannya, mampu melalui periode sulit dalam kehidupan dengan mengandalkan kemampuan yang ada dalam dirinya dan menjalankan fungsi psikologi positif yang ada dalam dirinya, sehingga individu tersebut merasakan adanya kesejahteraan batin dalam hidupnya.

B. Aspek *Psychological Well-Being*

Ryff (1995) membagi dimensi kesejahteraan psikologis kedalam enam dimensi, dimensi tersebut antara lain:

1) Penerimaan Diri

Individu yang memiliki kesejahteraan psikologis tinggi maka dapat menerima dirinya sendiri maupun orang lain. Individu dapat menerima segala hal yang terjadi di dalam hidupnya baik kejadian yang dialami saat ini maupun yang terjadi pada masa lalunya. Sehingga dapat dikatakan bahwa individu yang memiliki tingkat kesejahteraan psikologis tinggi akan memiliki sikap yang positif pada dirinya.

2) Hubungan positif dengan orang lain

Sejalan dengan penjelasan diatas, apabila individu memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi maka akan memiliki sikap positif terhadap dirinya. Sikap positif tersebut akan membawa pengaruh baik dengan orang lain. Individu tersebut akan mampu beradaptasi dan berinteraksi terhadap lingkungannya dengan baik, adanya rasa saling membantu satu sama lain, saling percaya, saling terbuka dan adanya perasaan empati terhadap kesejahteraan psikologis orang lain.

3) Otonomi

Otonomi atau kemandirian pada individu dengan tingkat kesejahteraan psikologis yang tinggi dapat membuat individu memiliki tanggung jawab untuk mengambil suatu keputusan dalam hidupnya, mampu mengatasi berbagai permasalahan atau tekanan yang sedang dihadapinya, serta mampu berfikir dan mengevaluasi diri sendiri dengan baik.

4) Penguasaan lingkungan

Dengan tingkat kesejahteraan psikologis tinggi, dapat mengarahkan beberapa kegiatan eksternal diluar dirinya, memiliki rasa penguasaan dan bersaing dalam lingkungan serta mampu memilih lingkungan yang baik atau tidak sesuai dengan kebutuhan individu tersebut.

5) Tujuan hidup

Dengan tingkat kesejahteraan psikologis tinggi maka akan memiliki sikap positif terhadap dirinya. Sikap tersebut akan membuat individu memiliki pandangan tentang tujuan hidup atau arah hidup yang ingin dicapai. Seseorang tentu memiliki tujuan hidup masing- masing agar hidupnya bermakna dan bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

6) Pengembangan pribadi

Dengan tingkat kesejahteraan psikologis tinggi maka akan melakukan pengembangan dalam dirinya dengan mencari pengalaman baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pengembangan tersebut dilakukan supaya individu dapat menyadari potensi yang dimilikinya serta dapat melakukan evaluasi terhadap dirinya.

Menurut Dayton dkk (2001) menjelaskan aspek-aspek kesejahteraan psikologis yang terbagi menjadi lima aspek, diantara sebagai berikut :

- a. Penerimaan, penerimaan individu terhadap kehidupannya termasuk penerimaannya terhadap dirinya sendiri ataupun takdir.
- b. Keselarasan, kemampuan seseorang untuk membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain seperti keluarga, teman, ataupun tetangga sehingga memberikan rasa aman dalam suatu hubungan.
- c. Interdependensi, perasaan saling ketergantungan dan membutuhkan satu sama lain.
- d. Kenikmatan, kemampuan individu dalam menikmati hidupnya secara menyeluruh.
- e. Penghormatan, penghormatan dengan orang lain menunjukkan bahwa keberadaan seseorang sangat dihargai dalam sebuah perkumpulan atau komunitas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek – aspek dalam kesejahteraan psikologis meliputi kemampuan individu dalam menerima diri apa adanya, mampu mengembangkan potensi dalam dirinya, memiliki hubungan yang positif dengan orang lain, memiliki kemandirian, memiliki tujuan dalam hidup, dan mampu menguasai lingkungannya. Aspek-aspek *psychological well-being* yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori dikemukakan oleh Ryff yang meliputi penerimaan diri, hubungan positif terhadap sesama, otonomi, penguasaan terhadap lingkungan, tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi.

C. Faktor-faktor Psychological Well-Being

Ryff (1989) menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang meliputi:

1) Usia

Pada dimensi kesejahteraan psikologis seperti otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup dan pengembangan pribadi akan mempengaruhi usia karena semakin bertambahnya usia akan semakin meningkat.

2) Jenis kelamin

Perbedaan pada jenis kelamin seseorang juga akan mempengaruhi kesejahteraan psikologis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ryff, terdapat perbedaan yang signifikan pada jenis kelamin perempuan. Hal tersebut berkaitan pada dimensi hubungan positif dengan orang lain.

3) Religiusitas

Religiusitas juga mampu mempengaruhi kesejahteraan psikologis individu apabila individu tersebut memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Religiusitas yang tinggi, membuat individu dapat mengatasi segala permasalahan atau tekanan secara positif, individu tersebut dapat mengambil hikmah terhadap apa yang terjadi dalam hidupnya. Individu juga dapat bersikap baik dengan lingkungan sehingga munculnya kepuasan dalam hidup.

4) Dukungan sosial

Dukungan sosial sangat mempengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang karena dengan adanya dukungan sosial, individu akan merasa dicintai, dihargai, serta merasa dipedulikan, sehingga akan muncul perasaan aman, nyaman dan tenang pada individu. dukungan sosial tersebut bisa berasal dari mana saja seperti teman, keluarga, pasangan, dan lain-lain.

5) Status sosial ekonomi

Status sosial ekonomi dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang. Apabila tingkat penghasilan yang diperoleh tinggi serta adanya dukungan sosial maka individu tersebut akan memperoleh kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Hal tersebut juga di dukung oleh beberapa pendapat dalam penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologi meliputi adanya dukungan sosial yang memberikan individu rasa aman, tenang serta merasa diargai.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Schmutte dan Ryff (1997) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*), antara lain:

- a. Kepribadian pada faktor ini merupakan apabila individu memiliki kepribadian yang mengarah pada sifat-sifat negatif seperti mudah marah, mudah stres, mudah terpengaruh dan cenderung labil akan menyebabkan terbentuknya keadaan *psychological well-being* yang rendah. Sebaliknya, apabila individu memiliki kepribadian yang baik, maka individu akan lebih bahagia dan sejahtera karena mampu melewati tantangan dalam kehidupannya.
- b. Pekerjaan merupakan sifatnya rentan terhadap korupsi, iklim organisasi yang tidak mendukung dan pekerjaan yang tidak disenangi akan menyebabkan terbentuknya keadaan *psychological well-being* yang rendah, begitu pula sebaliknya.
- c. Kesehatan dan fungsi fisik merupakan individu yang mengalami gangguan kesehatan dan fungsi fisik yang tidak optimal atau terganggu dapat menyebabkan rendahnya *psychological well-being* individu tersebut. Sebaliknya, apabila individu memiliki kesehatan dan fungsi yang baik, akan memiliki *psychological well-being* yang tinggi.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *psychological well-being* meliputi usia, jenis kelamin, kelas sosial, jenis pekerjaan, status kerja, tingkat pendidikan, latar belakang

budaya, kepribadian, kesehatan dan fungsi fisik, religiusitas serta dukungan sosial.

2.2 Personel SAT SAMAPTA

Sabhara Polri (SAT SAMAPTA) adalah salah satu pengembang fungsi polisi tugas umum merupakan tulang punggung polri yang selalu berada pertama kali ditengah-tengah masyarakat sebelum kehadiran fungsi kepolisian lainnya. Sabhara tidak dapat dipisahkan dari awal berdirinya Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai Polisi Pelaksana Tugas Umum, pada tanggal 11 Maret 1952 dibentuklah pasukan Polisi Perintis yang berasal dari anggota Polisi tugas umum dalam rangka menghadapi kekacauan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Tugas sehari-hari Polisi ini adalah melakukan patroli dan penjagaan keamanan diwilayah pemukiman dimana sering terjadi aksi kejahatan. Saat ini Sabhara Polri tergelar dari Markas Besar, Polda, Polres, Polsek dan Polsub Sektor yang didalam kesehariannya melaksanakan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli atau turjawali, tindakan pertama di tempat kejadian perkara atau TPTKP, penanganan tindak pidana ringan atau TIPIRING, pengendalian masa atau DALMAS, negosiator dan bantuan SAR. Kegiatan pengaturan yang dilaksanakan fungsi Samapta merupakan kegiatan pengaturan yang bertujuan agar semua kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Penjagaan yang dilaksanakan oleh fungsi Samapta adalah penjagaan dalam kegiatan masyarakat dan pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman baik berdasarkan permintaan maupun penilaian dan perkiraan akan timbulnya kegiatan kamtibmas. Pengawalan yang

dilaksanakan oleh fungsi Sampata bertujuan untuk mengamankan perpindahan objek dari satu tempat ke tempat lainnya agar dapat tiba ditujuan dengan lancar dan terhindar dari gangguan keamanan. Kegiatan patroli Sabhara dilaksanakan dengan cara menjelajahi wilayah tertentu berdasarkan hasil analisa dan evaluasi serta informasi dan laporan masyarakat dimana wilayah tersebut terdapat potensi gangguan atau sedang terjadi gangguan keamanan dan ketertiban yang memerlukan kehadiran polisi. Patroli yang dilaksanakan oleh fungsi Sabhara adalah patroli jalan kaki, bersepeda, motor roda 2, roda 4, patroli skala besar, serta patroli berkuda, serta patroli dengan menyertakan anjing pelacak. Untuk dapat menyentuh dan memberikan solusi kepada masyarakat yang memerlukan kehadiran Polisi maka kegiatan Patroli Sabhara dilaksanakan dengan mengedepankan dialog kepada masyarakat. Dalam kegiatan Turjawali ini Sat Samapta dituntut untuk memiliki sikap tampang yang ramah, santun, peduli dan humanis serta memiliki kewaspadaan dan kepekaan yang tinggi dalam mengamati dan menilai situasi sehingga tugas turjawali ini juga adapat dijadikan sebagai diteksi dini dan diteksi aksi dari suatu tindakan yang dapat menimbulkan gangguan kantibmas. Tindakan Pertama di tempat Kejadian Perkara atau disingkat TPTKP merupakan salah satu tugas pokok fungsi Sabhara dalam rangka melaksanakan kegiatan pengamanan agar TKP tetap dalam keadaan status quo sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut oleh fungsi terkait. Penanganan pelanggaran dan Tindak Pidana Ringan atau TIPIRING atau dilaksanakan oleh fungsi Sabhara dilaksanakan dalam rangka mencegah merebaknya penyakit masyarakat yang berdampak pada timbulnya

gangguan Kamtibmas. Pelayanan dan Pengamanan Penyampaian Pendapat dimuka Umum atau biasa dikenal dengan unjuk rasa yang dilaksanakan oleh fungsi Sabhara merupakan amanat Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Setiap kegiatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dimuka umum yang sesuai Undang-Undang akan selalu dikawal, dilayani dan diamankan oleh satuan pengendali masa atau biasa disebut Satuan Dalmas Sabhara sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Dalam rangka membantu penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat agar tercapai win- winsolution antar masyarakat Sabhara Polri juga melaksanakan tugas negosiasi, negosiasi yang dilaksanakan oleh fungsi Sabhara dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak melawan hukum baik saat menyampaikan pendapat muka umum, tindak pidana maupun konflik sosial.

2.3 Polres Sukoharjo

Polres Sukoharjo adalah singkatan dari Kepolisian Resor Sukoharjo, yaitu lembaga penegak hukum yang berada di bawah naungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) dan merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polres Sukoharjo bertugas menyelenggarakan fungsi-fungsi kepolisian dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.

2.4 Kerangka Berpikir *Psychological Well-Being* Pada Personel Sat Samapta di Polres Sukoharjo



Personel Satuan Samapta (Sat Samapta) di Polres Sukoharjo memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Mereka terlibat langsung dalam berbagai kegiatan operasional seperti patroli, pengamanan kegiatan masyarakat, pengawalan, hingga penanganan kericuhan. Beban kerja tersebut menuntut kesiapan fisik, emosional, dan mental yang tinggi. Dalam pelaksanaan tugasnya, personel Sat Samapta dihadapkan pada berbagai tekanan seperti tuntutan masyarakat yang besar, risiko keselamatan, beban kerja berat, jam kerja tidak menentu, serta potensi konflik di lapangan. Tekanan-tekanan tersebut dapat menimbulkan stres kerja dan memengaruhi kondisi psikologis personel.

Menurut Ryff (1989), *psychological well-being* (PWB) atau kesejahteraan psikologis merupakan kondisi ketika individu mampu berfungsi secara optimal dan

memiliki penilaian positif terhadap dirinya dan kehidupannya. Ryff menjelaskan bahwa PWB terdiri dari enam dimensi, yaitu *Self-acceptance* (penerimaan diri), *Positive relations with others* (hubungan positif dengan orang lain), *Autonomy* (kemandirian), *Environmental mastery* (penguasaan lingkungan), *Purpose in life* (tujuan hidup), dan *Personal growth* (pertumbuhan pribadi).

Psychological well-being pada personel sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan lingkungan kerjanya. Beberapa faktor penting yang berpotensi memengaruhi *psychological well-being* antara lain stres kerja, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja. Apabila *psychological well-being* (PWB) personel Sat Samapta berada pada tingkat tinggi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa individu mampu berfungsi secara psikologis secara optimal. Personel yang memiliki *psychological well-being* tinggi akan memiliki penerimaan diri yang baik, mampu melihat pengalaman hidupnya secara positif, serta tidak mudah terpengaruh oleh kegagalan atau tekanan tugas. Mereka juga cenderung mampu menjalin hubungan positif dengan rekan kerja, saling mendukung, dan memiliki empati dalam menjalankan tugas bersama. Dalam aspek *autonomy*, personel dengan *psychological well-being* tinggi dapat mengambil keputusan dengan mandiri tanpa mudah terpengaruh tekanan dari luar, namun tetap mempertimbangkan nilai-nilai organisasi dan tanggung jawab profesinya. Selain itu, tingginya *psychological well-being* juga tercermin dari kemampuan menguasai lingkungan, di mana individu mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lapangan, menghadapi masyarakat dengan bijak, serta mengelola stres kerja dengan cara yang sehat. Pada dimensi *purpose in life*, personel dengan *psychological well-being* tinggi memiliki kesadaran akan

makna pekerjaannya sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat dan negara. Hal ini menumbuhkan motivasi intrinsik yang kuat dan rasa bangga terhadap profesinya sebagai anggota kepolisian. Sedangkan dalam personal growth, individu dengan *psychological well-being* tinggi memiliki semangat untuk terus berkembang, belajar dari pengalaman, dan meningkatkan kompetensi diri agar dapat menjalankan tugas lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut, *psychological well-being* pada Personel Sat Samapta di Polres Sukoharjo yang tinggi akan berdampak positif terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti meningkatnya kinerja dan produktivitas, munculnya ketenangan emosional dan stabilitas psikologis, meningkatnya kemampuan pengendalian diri saat menghadapi situasi berisiko tinggi, terjaganya hubungan sosial yang sehat di lingkungan kerja, serta tercapainya kepuasan dan makna hidup dalam pekerjaan. Apabila *psychological well-being* personel berada dalam kondisi rendah, dampaknya tidak hanya dirasakan secara pribadi tetapi juga secara profesional. Personel dapat menjadi mudah lelah, emosional, kurang fokus, menurun kedisiplinannya, serta mengalami penurunan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penting bagi institusi kepolisian untuk memperhatikan kesejahteraan psikologis personel guna menjaga kinerja optimal dan profesionalisme tugas kepolisian.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa personel sat samapta harus memiliki *psychological well-being* yang baik. Fokus penelitian tersebut dilakukan pengkajian terhadap *psychological well-being* personel sat

samapta, dengan mengetahui bagaimana *psychological well-being* pada personel sat samapta di Polres Sukoharjo.

2.5 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah “Bagaimana *Psychological Well-Being* Pada Personel Sat Samapta di Polres Sukoharjo?”

